

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Perbankan syariah di Indonesia

Regulasi perbankan syariah di Indonesia yaitu berawal pada Undang-Undang no 7 1992, kemudian di amandemen oleh Undang-Undang no 10 Tahun 1998 lalu di amandement dengan Undang-Undang yang lebih rinci mengatur tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang no 21 Tahun 2008

2. Regulasi Perbankan Syariah Di Malaysia

Regulasi perbankan syariah di Malaysia pertama yaitu bertumpu pada Islamic Banking Act tahun 1983 dan Banking and Financial Institutions Act 1989 yang kemudian Islamic Banking Act mengalami perubahan pada Tahun 2006 sedangkan Banking and Financial Institutions Act 1989 mengalami amandemen pada Tahun 1996.

3. Kelebihan Dan Kekurangan Regulasi Perbankan Syariah Indonesia Dengan Malaysia

Kelebihan dan kekurangan regulasi perbankan syariah di Indonesia undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini memiliki kelebihan untuk membuka kesempatan pengembangan jaringan perbankan syariah, Kekurangan pada regulasi ini Bank syariah tunduk pada dua sitem hukum yang berbeda, eksistensi dewan pengawas syariah, pengawasan bank syariah masih berdasarkan prinsip konvensional. Perbankan syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang di tawarkan oleh investment banking, karna jasa-jasa bank syariah merupakan kombinasi, Bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk: lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sodaqoh, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada badan penyalur. Kekurangan dari regulasi ini Ketentuan tentang pembebasan penggunaan tenaga kerja asing, dimana tenaga kerja Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Kelebihan

dan kekurangan regulasi perbankan syariah di Malaysia kelebihan di lihat dari regulasi perbankan syariah di Malaysia pada IBA 1993 bersifat umum dan tidak komprehensif atau dengan kata lain memberikan ruang fleksibilitas kepada perbankan syariah.

Kekurangannya dapat di lihat dari Tidak bersifat komprehensif sehingga dapat memunculkan berbagai interpretasi, jumlah bank yang menawarkan produk semakin banyak dengan kemasan yang semakin beragam, dan SAC sebagai satu-satunya otoritas tertinggi.

4. Diferensial Regulasi Perbankan Syariah

Perbedaan dukungan politik antara Indonesia dan Malaysia serta perbedaan pendekatan pembangunan ekonomi yang mempengaruhi cepat atau lambatnya pembentukan Undang-Undang dimana Malaysia di dukung oleh dukungan pemerintah sedangkan Indonesia tidak pendekatan pembangunan ekonomi yang mana Malaysia diuntungkan oleh penetapan rencana pembangunan ekonomi jangka panjang oleh kolonial dan Indonesia yang diperburuk oleh pemerintah Belanda dalam pembangunan ekonomi, perbedaan lain di tinjau dari tujuan dari amandemen Undang-Undang. Dan yang terakhir yaitu dari kepatuhan syariah dimana Indonesia belum sepenuhnya patuh terhadap kepatuhan syariah dan walau Malaysia pun belum sepenuhnya patuh terhadap kepatuhan syariah akan tetapi Malaysia lebih patuh terhadap kepatuhan syariah dalam praktik di perbankan syariah karena di dukung oleh pemerintah yang menjadikan agama Islam sebagai agama resminya.

B. Saran

Seharusnya Indonesia dan Malaysia memisahkan Bank Sentral konvensional dengan bank syariah agar perbankan syariah bisa beroperasi murni akan kesyariahannya dan bisa lebih fokus untuk mengembangkan perbankan syariah menuju pasar yang lebih luas lagi, serta Dewan Pengawas harus lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap praktik perbankan syariah, mengedukasi masyarakat tentang perbankan syariah agar bisa mengakselerasi perkembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah